

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada indek inflasi Kota Bukittinggi atau Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2024 adalah sebagai berikut :

| Januari | Februari | Maret |
|----------------|-----------------|--------------|
| 2,57% | 3,32% | 3.93% |

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat di 4 kabupaten/ kota, pada Januari 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,57 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,97 pada Januari 2023 menjadi 105,62 pada Januari 2024. Secara m-to-m dan y-to-d Provinsi Sumatera Barat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,32 persen.

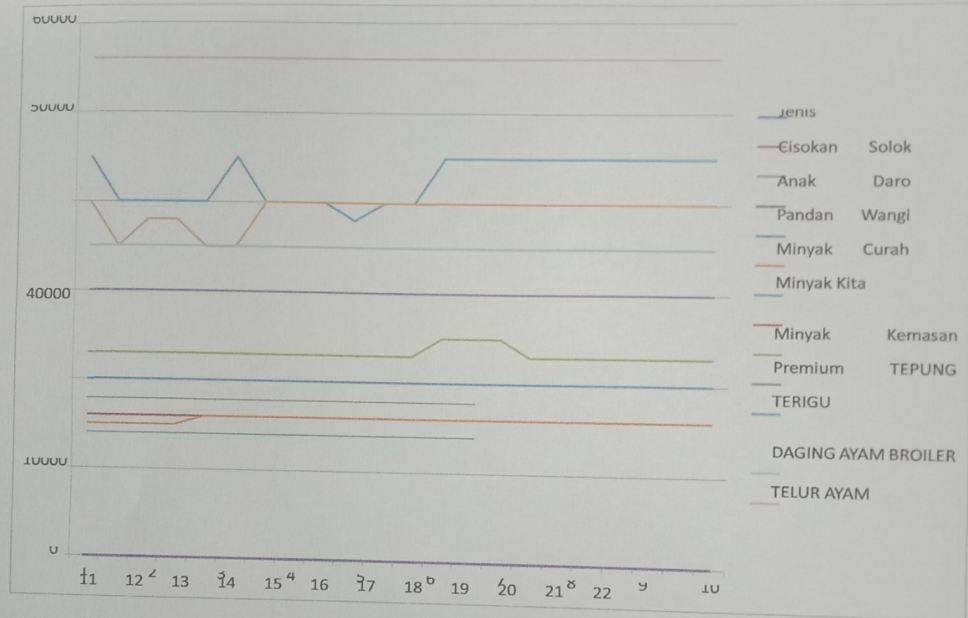
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 3,73 persen dengan IHK sebesar 105,88 dan terendah terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 1,38 persen dengan IHK sebesar 104,34.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat di 4 kabupaten/ kota, pada Februari 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,32 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,62 pada Januari 2023 menjadi 106,86 pada Februari 2024. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Februari 2024 mengalami inflasi sebesar 1,17 persen. Hingga Februari 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,85 persen.

Pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,93 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,54. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,90 persen dengan IHK sebesar 109,60 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,39 persen dengan IHK sebesar 106,88.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat di 4 kabupaten/kota, pada Maret 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,93 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,47 pada Maret 2023 menjadi 107,54 pada Maret 2024. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 0,64 persen. Hingga Maret 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,49 persen.

**HARGA BAHAN POKOK
BULAN JANUARI 2024
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

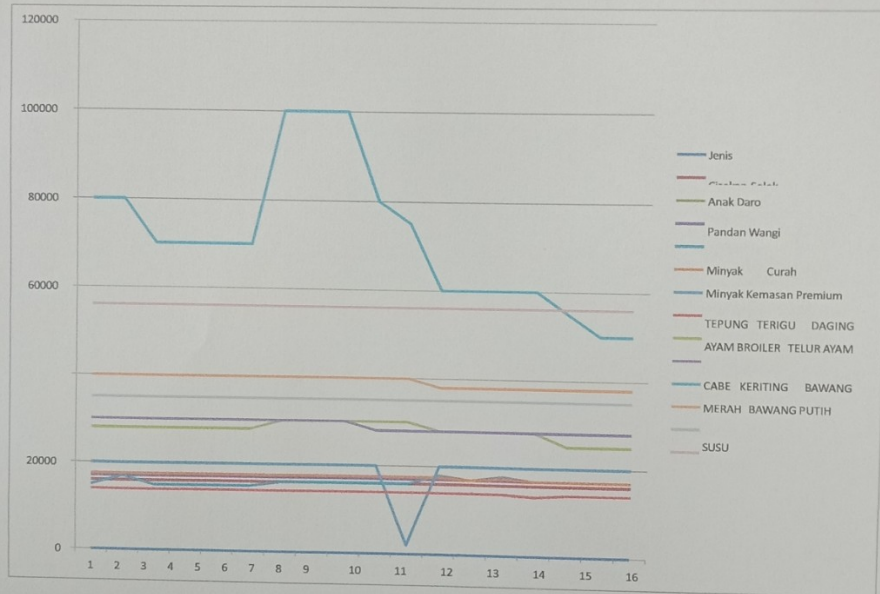


keterangan : Beras jenis pandan wangi, terhitung sejak tanggal 15 September hilang dari pasaran dikarenakan harga beras tersebut naik

HARGA BAHAN POKOK
BULAN FEBRUARI 2024
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HARGA BAHAN POKOK
BULAN MARET 2024
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Penyebab terjadinya inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) di Kota Padang maupun Kota Bukittinggi untuk periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy), Inflasi yoy gabungan dua kota terjadi karena adanya kenaikan indeks harga konsumen (IHK) pada sembilan kelompok pengeluaran. Kota Padang sebesar 2,15 persen dengan IHK sebesar 116,22. Sementara, inflasi Kota Bukittinggi 2,47 persen dengan IHK sebesar 116,18. Secara agregat, inflasi yoy gabungan dua kota tersebut yakni 2,20 persen dengan IHK sebesar 116,22. Sembilan kelompok pengeluaran penyebab inflasi tersebut yakni transportasi sebesar 8,59 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,75 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,13 persen. Kemudian pendidikan sebesar 2,30 persen, kesehatan sebesar 2,29 persen, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,20 persen, rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,80 persen, pakaian dan alas kaki sebesar 1,36 persen serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,07 persen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Alokasi anggaran pengendalian inflasi daerah diarahkan untuk program dan kegiatan

1. dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.
 2. Perlunya ditingkatkan kapasitas anggota TPID ntuk lebih memahami tugas dan fungsi TPID dalam upaya pengendalian inflasi Daerah.
 3. Koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan komunikasi efektif antar Kabupaten dan Kota serta Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi pelaksanaan.
 4. Review terhadap RAD Inflasi.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Bersama Tim TPID mengidentifikasi alokasi anggaran pada perangkat daerah untuk mendukung program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
 2. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berkesinambungan dari TW I- TW IV.
 3. Mengarahkan program kegiatan pada kegiatan :
 4. Pemantauan harga dan stok
 5. Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
 6. Menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang dan bahan pokok
 7. Pencanaan gerakan menanam
 8. Operasi pasar murah
 9. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor
 10. Meningkatkan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi